

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakekat pendidikan adalah memanusiakan manusia, mengembangkan potensi peserta didik agar berani dan mampu menghadapi problem yang dihadapi tanpa rasa tertekan, mampu dan senang meningkatkan fitrahnya sebagai khalifah dimuka bumi. Setiap orang tua mengharapkan anaknya terlahir dalam kondisi yang normal secara fisik maupun mental. Namun dalam kenyataan tidak demikian, karena kondisi fisik dan mental yang beragam sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengikuti pendidikan secara normal.

Dalam undang-undang dasar tahun 1945 yang sudah diamandemen memberikan jaminan seperti yang tercantum pada pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, pada ayat 2 menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang dimaksud pemerintah dalam undang-undang ini adalah pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota.¹

Permendiknas nomor 70 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara

¹Mudjito, Harizal, dan Elfindri, *Pendidikan Inklusif*, (Jakarta: Badouse Media, 2012), h. 11.

inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai kebutuhan dan kemampuannya.. peserta didik yang memiliki kelainan terdiri atas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunaganda, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya.²

Berikut ini beberapa dokumen hukum yang melandasi pelaksanaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, landasan hukum tersebut adalah:

1. Deklarasi universal hak asasi manusia 1948 (*Declaration of Human Rights*).
2. Konvensi hak anak 1989 (*Convention in the rights of the child*).
3. Deklarasi dunia tentang pendidikan untuk semua (*Education for all*)- Jomtien, Thailand, 1990.
4. Resolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993: peraturan standar tentang persamaan kesempatan bagi penyandang Disabilitas (*Standard Rules on Equalization of Opprtunities for Presons with disabilities*).
5. Pernyataan Salamanca (UNESCO), Spanyol, 1994.
6. Konvensi hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the rights of persons with Disabilities*) (Resolusi PBB 61/106, 13 Desember 2006).
7. Undang-undang dasar 1945 (amandemen), khususnya pasal 31 ayat (1) : “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan “. dan ayat (2): “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya”.

²Wildan Zulkarnain, *Manajemen Layanan Khusus di Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 159.

8. Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
9. Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat.
10. Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
11. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.³
12. Undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang ratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas.
13. Undang-undang nomor 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi.
14. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
15. Peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas) nomor 70 tahun 2009, tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa.⁴

³Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus. *Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia* . 2013, h.5.

⁴Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan., *Strategi Umum ...*, h.5.

Salah satu upaya pemerintah memenuhi jaminan pendidikan, pemerintah sudah sejak lama menyelenggarakan layanan pendidikan untuk mereka. diantaranya peraturan pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 2 ayat (1) lingkungan standar nasional pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dalam PP No. 19/2005 tersebut juga dijelaskan bahwa satuan pendidikan khusus terdiri atas: SDLB, SMPLB dan SMALB.⁵

Pendidikan luar biasa ini bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan belajar dan sosial serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan.⁶

Pendidikan pada umumnya selalu berintikan kepada bimbingan. Sebab pendidikan bertujuan agar siswa menjadi kreatif, produktif, dan mandiri. Artinya pendidikan berupaya untuk mengembangkan individu anak. Segala aspek diri siswa harus dikembangkan seperti intelektual, moral, sosial, kognitif, dan emosional.⁷

⁵Direktorat Jendral Pendidikan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. 2013, h. 6.

⁶Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995),h. 75.

⁷Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 5.

Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (pasal 1 angka 6) menyatakan bahwa konselor adalah pendidik. Pernyataan ini menegaskan bahwa bidang pekerjaan konselor, yaitu konseling yang biasanya disebut dengan bimbingan konseling adalah pendidikan. Karena konseling adalah pendidikan, maka segenap materi pokok sebagaimana muatan pasal dan ayat undang-undang sistem pendidikan nasional tersebut diatas, yaitu tentang pengertian pendidikan, fungsi dan tugas pendidikan nasional, penyelenggaraan pendidikan, dan hak pelayanan pendidikan untuk setiap peserta didik pada satuan pendidikan sepenuhnya menjadi acuan kinerja konselor sebagai tenaga pendidik.

Disamping itu, pasal 39 ayat 1 UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tersebut yang menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang memberikan pengertian bahwa konselor adalah sebagai penyelenggara pelayanan konseling atau bimbingan konseling adalah tenaga profesional. Dalam kaitan ini, lebih spesifik lagi, peraturan menteri pendidikan nasional nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor menegaskan bahwa yang disebut konselor adalah sarjana (S-1) bimbingan konseling yang telah menamatkan program pendidikan profesi Konselor.⁸

Begitu juga dengan pendidikan luar biasa, bimbingan konseling di sekolah ini juga memberikan bantuan kepada siswa agar ia sebagai pribadi, yang

⁸Abkin, *Pelayanan Bimbingan dan Konseling*, (Semarang, 2003), h. 4.

memiliki pemahaman yang benar akan diri pribadi, dunia belajar dan dunia disekitarnya.

Secara umum Al-Qur'an diturunkan untuk membimbing manusia ke arah jalan yang benar. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Melalui fungsi ini, Al-Qur'an sebagai petunjuk yang akan membimbing manusia ke arah yang benar dan diridhai Allah.⁹ Makna ini menunjukkan bahwa petunjuk-petunjuk kitab suci Al-Qur'an bukan sekedar teori, tetapi telah terbukti kemampuannya dalam kenyataan sehingga telah berhasil memberi petunjuk keselamatan bagi sekian banyak sebelum turunnya ayat ini.¹⁰ Maka kehadiran layanan bimbingan tidak hanya merupakan keharusan, tetapi juga menuntut suatu lembaga dan tenaga professional dalam pengelolaannya yang bertujuan untuk membina pribadi peserta didik.¹¹

Pemberian bimbingan dan pengarahan oleh seorang guru, ia dituntut untuk menyampaikan materi pembelajaran dan bimbingan dengan bijaksana. Suatu keharusan bagi setiap guru yang bertanggung jawab, bahwa dia dalam melaksanakan tugasnya harus berbuat dengan cara yang sesuai dengan “keadaan”

⁹Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.54.

¹⁰M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 109.

¹¹Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Ciputat Pers,2002), h. 37.

si anak didik.¹² Dalam hal ini diharapkan program-program bimbingan konseling yang ada, bisa membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengatasi permasalahan yang akan menghampiri mereka.

Agar program-program dapat dilaksanakan, diperlukan manajemen yang baik, berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program bimbingan konseling, itu semua dilakukan untuk membantu memecahkan permasalahan yang di hadapi oleh anak tuna rungu.

Fungsi-fungsi manajemen merupakan inti dari manajemen itu sendiri. Fungsi-fungsi tersebut merupakan proses yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam sebuah organisasi. Fungsi-fungsi ini pula yang menentukan berhasil dan tidaknya kinerja manajemen.

Dalam Al-Qur'an dan hadist terdapat banyak sekali, ayat-ayat dan hadist yang berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen, ini merupakan salah satu bukti atas kesempurnaan agama islam, dimana agama islam dapat mencover segala macam keilmuan yang ada, diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: ١٨)

¹²Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 1.

Perintah untuk memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok dipahami oleh Thabathabai sebagai perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah dilakukan. Ini seperti tukang yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Ia dituntut untuk memperhatikannya kembali agar menyempurnakannya bila telah baik, atau memperbaikinya bila masih ada kekurangan. Sehingga jika tiba saatnya diperiksa, tidak ada lagi kekurangan dan barang tersebut tampil sempurna.¹³

Suatu kemudahan dalam islam, perencanaan yang baik apabila tidak terlaksana, dan dengan perencanaan yang buruk walaupun juga tidak terlaksana, berbeda kadar pahala dan dosa dalam syariah fiqih.¹⁴

Manajemen sendiri mempunyai peran yang sangat penting dalam perencanaan dan pengelolaan dalam sebuah lembaga pendidikan, tanpa manajemen yang baik tidak akan terwujud lembaga pendidikan yang baik. Sikap yang merupakan termasuk perilaku organisasi tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan sebuah sekolah, ada sekolah yang mempunyai anak-anak didik yang berperilaku diluar batas normal, maka hal itu akan mempengaruhi reputasi dan pandangan pihak lain terhadap sekolah tersebut. Oleh karena itu, manajemen yang baik sangat penting untuk mengatur dan menata sebuah lembaga pendidikan secara menyeluruh agar semua masalah yang dihadapi tidak menjadi penghambat bahkan mungkin akan menjadikannya hal positif yang membangun

¹³M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h.552.

¹⁴Inu Kencana Syafie, *Al-qur'an dan Ilmu Administrasi*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2000), h.61

lembaga pendidikan itu sendiri. Ruang lingkup manajemen itu sendiri mencakup beberapa aspek, diantaranya adalah manajemen layanan khusus.

Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Program layanan khusus merupakan faktor pendukung kualitas pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah sekolah. Itu sebabnya sampai saat ini program layanan khusus masih terus digalakkan dan dilaksanakan pada hampir semua sekolah di Indonesia. Program layanan khusus kesiswaan itu salah satunya adalah layanan bimbingan dan konseling.¹⁵

SMALB Dharma Wanita adalah sekolah yang dikhususkan untuk membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan mental untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Sesuai dengan studi pendahuluan yang peneliti lakukan dilokasi penelitian, anak tuna rungu mengalami berbagai macam permasalahan. Masalah yang biasanya dihadapi anak tuna rungu dihipunkan menjadi empat kategori, yaitu:

¹⁵Basilius R. werang, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2015), h. 157.

Masalah pribadi, anak tuna rungu sangat tidak mampu untuk menyesuaikan diri, sifatnya tertutup, sensitif dan mudah tersinggung. lebih tidak stabil emosinya, dan lebih *neurotik* (mengalami kecemasan yang berlebihan dibandingkan dengan anak yang pendengarannya normal), sehingga lebih cenderung frustrasi. Akibatnya sering menampilkan sikap-sikap asosial, bermusuhan, atau menarik diri dari lingkungan. Oleh Karena itu perlu pendekatan yang luar biasa membangun komunikasi yang harmonis, membangun kepercayaan kepada kita, sehingga dia baru mau untuk mengutarakan permasalahannya.

Masalah sosial, keterbatasan didalam pendengaran, terbatas dalam kosa kata, pembendaharaan kata merupakan pangkal permasalahan sosial bagi mereka, sehingga sering terjadi *miss communication* (kesalah pahaman) dan mengakibatkan percekcoakan. Keadaan ini semakin tidak menguntungkan ketika tekanan dari lingkungan berupa cemoohan, ejekan dan bentuk penolakan yang berdampak negatif, hal ini yang membuat anak tuna rungu semakin tidak aman, bimbang dan ragu-ragu terhadap keberadaan diri dan sosialnya.

Masalah belajar, pemberian materi pembelajaran tidak sama dengan anak normal pada umumnya, pemberian mata pelajaran dikelas sesuai dengan observasi peneliti yaitu dengan tulisan, gambaran bahasa isyarat agar anak tuna rungu dapat memahaminya. Dalam penulisan kalimat mereka menggunakan hukum M-D, (menerangkan dan diterangkan) contohnya kalau kita menulis, saya hari ini jam sekian mau ke pasar, klo mereka dibalik kepasar jam hari ini saya, itu.

Masalah karir, kebanyakan instansi atau lembaga alergi untuk mempekerjakan anak-anak dissabilitas khususnya yang jurusan tuna rungu, karena

menurut mereka susah untuk berkomunikasi anak tuna rungu. Oleh karena itu kita harus bisa meyakinkan kepada pihak ketiga atau pihak lain bahwa mereka dapat diamanahi sebuah tanggung jawab. Mereka akan bekerja sesuai dengan *job description*nya oleh karena itu kepada instansi atau lembaga harus memberikan *job description* yang jelas. Karena mereka mempunyai kekurangan dan kelebihan, kekurangan anak tuna rungu yang harus kita maklumi adalah kurangnya berinovasi dalam berkerja. Adapun kelebihan mereka ini lebih tekun, lebih jujur, lebih bertanggung jawab, cukup rapi, dan tidak punya pemikiran untuk merugikan orang lain.¹⁶

Masalah yang dihadapi anak tuna rungu mendapat perhatian, penanganan dan bimbingan serius dari pihak sekolah. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi dilakukan guru BK sebagai upaya dalam mengatasi problem-problem yang dialami oleh anak tuna rungu. Manajemen program bimbingan konseling terhadap anak tuna rungu di SMALB Dharma Wanita dilakukan dengan baik dan terencana, terdapat berbagai pelatihan sebagai bekal untuk siswa agar mempunyai keahlian dibidang yang mereka minati. Beberapa siswa terpilih bahkan diberikan pelatihan di Pondok Bambu Jakarta Timur selama tiga tahun, sehingga banyak output dari sekolah ini mempunyai kualitas yang baik. Sejauh ini, belum ada penelitian yang meneliti manajemen program bimbingan konseling bagi anak tuna rungu di sekolah ini dan penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan tersebut. Penelitian ini akan penulis paparkan dalam tesis ini dengan judul; “**Manajemen**

¹⁶Wawancara dengan Subagya, Kepala SMALB Dharma Wanita, 17 Januari 2018

Program Bimbingan Konseling Bagi Anak Tuna Rungu di SMALB Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan manajemen program bimbingan konseling bagi anak tuna rungu di SMALB Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan, yang meliputi:

1. Perencanaan program bimbingan konseling anak tuna rungu di SMALB Dharma Wanita.
2. Pengorganisasian program bimbingan konseling anak tuna rungu di SMALB Dharma Wanita.
3. Pelaksanaan program bimbingan konseling anak tuna rungu di SMALB Dharma Wanita.
4. Pengawasan program bimbingan konseling anak tuna rungu di SMALB Dharma Wanita.

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian sangatlah perlu menentukan tujuan, karena setiap pekerjaan yang tidak ditentukan tujuannya tidak akan mencapai sasaran yang tepat dan jelas. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan implementasi perencanaan program bimbingan konseling anak tuna rungu di SMALB Dharma Wanita

2. Memaparkan implementasi pengorganisasian program bimbingan konseling anak tuna rungu di SMALB Dharma Wanita
3. Mendeskripsikan implementasi pelaksanaan program bimbingan konseling anak tuna rungu di SMALB Dharma Wanita
4. Menggambarkan implementasi pengawasan program bimbingan konseling anak tuna rungu di SMALB Dharma Wanita.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis.

1. Aspek teoretis

- a. Sebagai referensi dalam keilmuan Manajemen Pendidikan Islam khususnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam pemberian Manajemen layanan khusus mengenai program bimbingan konseling terhadap anak tuna rungu.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan Program bimbingan konseling bagi anak tuna rungu.
- c. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dan kepustakaan dalam manajemen program bimbingan konseling terhadap anak tuna rungu, sehingga menjadi inspirasi terhadap penelitian selanjutnya.

- d. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian bimbingan konseling khususnya pendidikan luar biasa, serta menjadi solusi permasalahan yang dihadapi.

2. Aspek praktis

- a. Bagi pihak manajemen sekolah, sebagai sumbangan pemikiran dan bahan perbandingan untuk kemajuan dan peningkatan program bimbingan konseling terhadap anak tuna rungu di SMALB Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Bagi guru, sebagai bahan acuan dalam membimbing, mendidik, dan mengarahkan anak didik dalam proses pembelajaran dan pembinaan perkembangan.
- c. Bagi peneliti, menambah wawasan dalam bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus, memberikan pengalaman yang berharga dan menjadi bekal untuk menjadi manajer yang handal.

E. Definisi Istilah

1. Program Bimbingan Konseling

Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang efektif dan efisien. Program layanan khusus merupakan faktor pendukung kualitas pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah sekolah. Itu sebabnya sampai saat ini program layanan khusus masih terus digalakkan dan dilaksanakan pada hampir semua sekolah di Indonesia. Program layanan khusus kesiswaan itu salah satunya adalah

layanan bimbingan dan konseling.¹⁷ Program bimbingan konseling adalah suatu rangkaian kegiatan bimbingan konseling yang terencana, terorganisasi, dan terkoodinasi selama periode waktu tertentu.¹⁸

Dalam hal ini peneliti akan meneliti implementasi manajemen program bimbingan konseling yang diterapkan dalam rangka membimbing dan mendidik anak yang berkebutuhan khusus tuna rungu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya dalam kurun waktu tertentu.

2. Anak Tuna Rungu

Jika dalam proses mendengar terdapat satu atau lebih organ telinga bagian luar, organ bagian tengah, dan organ bagian dalam mengalami gangguan atau kerusakan disebabkan penyakit, kecelakaan atau sebab lain yang tidak diketahui, sehingga organ tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Anak yang berada dalam keadaan kelainan pendengaran seperti itu disebut anak berkelainan pendengaran/anak tuna rungu.¹⁹ Untuk mengetahui berapa desibel pendengaran yang tersisa yaitu dengan pemeriksaan oleh pihak yang terkait yang berkenaan tentang pengukuran seberapa banyak sisa pendengaran yang masih dimiliki oleh anak tuna rungu.

3. SMALB Dharma Wanita

SMALB Dharma Wanita merupakan layanan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus terutama anak tuna rungu dan grahita yang

¹⁷Basilus R. werang, *Manajmen Pendidikan di Sekolah ...*, h. 157.

¹⁸ W.S. Winkel, dan M.M.Sri Hastuti, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2006), h.119.

¹⁹Mohammed Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

terakreditasi A. Sekolah ini beralamat di Jl. Dharma Praja Rt. 17 No. 56 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Menurut sepengetahuan peneliti, setelah dilakukan kajian pustaka terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, ditemukan adanya penelitian yang berkaitan dengan *Manajemen Program Bimbingan Konseling Bagi Anak Tuna Rungu Di SMALB Dharma Wanita Provinsi Kalimantan Selatan* antara lain sebagai berikut:

1. Meriani, *Pengelolaan Pembelajaran Sekolah Inklusif di SDN Benua anyar 8 Banjarmasin*, Tesis IAIN Antasari, 2015. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran di SDN Benua Anyar 8 Banjarmasin tidak sepenuhnya mengikuti kurikulum dengan dengan standar nasional yang ditetapkan pemerintah. Dalam rancangan pembelajarannya dilakukan modifikasi dengan menurunkan tingkat kesulitan ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pelaksanaan pembelajaran dibuat dan dijalankan secara fleksibel, menyesuaikan dengan keadaan siswa ABK secara individual dalam hal materi pelajaran. Pendekatan yang digunakan adalah fungsional, pembiasaan, pengalaman, keteladanan, individual, kesabaran, dan kasih sayang. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan cara tertulis dan praktik, instrument

evaluasi (soal ujian tertulis) dimodifikasi sedemikian rupa agar lebih mudah, sederhana dalam pilihan jawaban.

2. Supardjo, *Pengelolaan Pembelajaran di SD Penyelenggara Pendidikan Inklusif SDN III Giriwo Wonogiri*, Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan dilakukan dengan pemberian program kekhususan dan program pembelajaran individual. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan sistem klasikal dan guru pembimbing khusus. Adapun penilaian pasti akan berbeda dengan anak biasa.
3. M. Zaenuddin, *Manajemen Pendidikan Islam bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Asrama Yaketunis Yogyakarta*, Tesis UIN Sunan Kalijaga 2015. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa asrama yaketunis mengelola pendidikan islam diasrama yaketunis bekerjasama dengan organisasi asrama yaketunis dan taman pendidikan Al-Qur'an luar biasa. Dalam teknis pelaksanaannya, seluruh perencanaan pendidikan dinilai baik, kecuali perencanaan kurikulum belum tersusun dengan baik, pelaksanaan pengorganisasian tenaga pendidik dan kependidikan dan kurikulum belum terlaksana dengan baik, pengarahan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan serta kurikulum belum terlaksana dengan baik, dan pengawasan dinilai secara keseluruhan terlaksana dengan baik.

Penelitian-penelitian di atas sama-sama membahas tentang manajemen pembelajaran inklusi disekolah dasar dan manajemen pendidikan islam di asrama. Penelitian-penelitian tersebut lebih menekankan manajemen pendidikan dan

pembelajaran di sekolah dan asrama. Pada tesis ini, peneliti meneliti tentang program bimbingan terhadap anak tuna rungu, artinya posisi peneliti lebih menekankan penelitian ini pada masalah-masalah yang di hadapi anak tuna rungu serta bagaimana implementasi manajemen program bimbingan konseling dalam mengatasi masalah pada anak tuna rungu di SMALB Dharma wanita.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan karya ilmiah ini terdiri atas lima bab dengan garis besar, yakni pada Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V sebagai berikut:

1. Bab I berupa pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi istilah, dan penelitian terdahulu.
2. Bab II berupa kerangka teoritis. Bab ini berisi tentang, konsep manajemen, konsep program bimbingan, konsep tuna rungu, manajemen sekolah dalam program bimbingan anak tuna rungu, dan tugas pokok dan fungsi bimbingan.
3. Bab III berupa metode penelitian. Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan sistematika penulisan.
4. Bab IV yakni tentang laporan hasil penelitian. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data,

5. Bab V berupa penutup yang berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian.